

# MANAJEMEN PARTISIPASI MASYARAKAT DI SMP NEGERI 2 BUNGORO KABUPATEN PANGKEP

**Hardika Rahayu<sup>1</sup>, Ansar<sup>2</sup>, Muh. Ardiansyah<sup>3</sup>**

Prodi Administrasi Pendidikan  
Program Pascasarjana  
Universitas Negeri Makassar

alamat e-mail:

[ayhuamai.13@gmail.com<sup>1</sup>](mailto:ayhuamai.13@gmail.com)

[ansarman69@gmail.com<sup>2</sup>](mailto:ansarman69@gmail.com)

[m.ardiansyah.adpend@gmail.com<sup>3</sup>](mailto:m.ardiansyah.adpend@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji tentang Manajemen Partisipasi Masyarakat di SMP Negeri 2 Bungoro Kabupaten Pangkep. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Manajemen Partisipasi Masyarakat di SMP Negeri 2 Bungoro Kabupaten Pangkep meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi untuk mengungkap fenomena atau fakta yang ada di lapangan. Adapun Teknik pengumpulan data dilakukan dengan: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model analisis Miles and Huberman: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen partisipasi masyarakat dalam pendidikan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di SMP Negeri 2 Bungoro Kabupaten Pangkep, telah berjalan dengan baik ditandai keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sekolah yang diwakili oleh komite sekolah. Adapun Bentuk pelaksanaan partisipasi masyarakat di SMP Negeri 2 Bungoro Kabupaten Pangkep berupa finansial, pengambilan keputusan, tenaga maupun partisipasi ide/pemikiran. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat ada dua, faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung terdiri dari akuntabilitas dan transparansi dari pihak sekolah, dan inovasi program. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu keterbatasan waktu yang dimiliki masyarakat menghambat mereka untuk berpartisipasi secara maksimal karena mereka memiliki kesibukan lain diluar dari kegiatan di Sekolah seperti pekerjaan dari masyarakat.

Kata kunci: Manajemen, Partisipasi, Masyarakat

**Abstract:** The study examines the management of public participation in SMPN 2 Bungoro in Pangkep district including planning, implementation, and evaluation. The research method employed a qualitative approach with phenomenological type to reveal the phenomena or facts discovered in the field. Data collection techniques employed observation, interviews, and documentation. Then, the data analysis was conducted by using Miles and Huberman's analysis model in the form of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study reveal that public participation in education in planning, implementation, and evaluation at SMPN 2 Bungoro in Pangkep district had been conducted well proven by the active involvement of the community in school management represented by the school committee. The forms of implementation of public participation at SMPN 2 Bungoro in Pangkep district are finance, decision making, energy, and participation of ideas/thoughts. There are two factors that influence public participation, namely the supporting and inhibiting factors. The supporting factors consist of accountability and transparency factors from the school with innovation programs. In contrast, the inhibiting factor is the limited time the community has to participate optimally because they have other activities outside of school, such as community work.

Keywords: Management, Participation, Community

## 1. PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 24, menjelaskan bahwa Modal yang sangat penting dalam pembangunan nasional berasal dari sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas. Sehingga pendidikan yang berkualitas dibutuhkan upaya dan koordinasi bersama antara berbagai pihak salah satunya yaitu pemerintah, keluarga dan masyarakat, kemudian pada pasal 54 ayat 1 dan 2 menjelaskan mengenai peran serta masyarakat dalam Pendidikan diantaranya kelompok, keluarga, perseorangan, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu Pendidikan serta pengusaha, selain dari itu masyarakat berperan sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil Pendidikan (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 24 dan Pasal 54 Ayat 1-2.).

Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional yang merupakan turunan dari UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 2 PP No. 39 tahun 1992 tersebut disebutkan bahwa peran serta masyarakat berfungsi turut serta dalam mengembangkan, meningkatkan, menumbuhkan, dan memelihara pendidikan nasional dengan maksud mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat bagi pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (pasal 3) (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992.pdf, Pasal 2 dan 3).

Peran serta masyarakat selanjutnya dijelaskan lebih lanjut pada Undang-Undang Nomer 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 5-7, mencakup konsekuensi otonomi yang lebih luas dan desentralisasi bidang-bidang

kewenangan daerah, termasuk pendidikan. Hakekat otonomi daerah adalah pemberian mandat sepenuhnya kepada masyarakat dalam mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri. Dengan demikian jika sekolah dapat melihat potensi dan peluang yang ada maka akan sangat berpengaruh besar bahkan akan eksis walaupun keberadaan sekolah tersebut berada pada daerah terdalam atau daerah dalam kategori miskin (Undang-Undang Nomer 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 Ayat 5-7).

Partisipasi Masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan bagian pada kegiatan yang dilakukan bersama. Partisipasi mempunyai arti bahwa keterlibatan seseorang atau sekelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk kegiatan maupun dalam bentuk pernyataan dengan memberikan masukan berupa tenaga, pikiran, keahlian, waktu, materi dan atau modal, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010 : 46)

Partisipasi aktif dan terbuka masyarakat dalam pendidikan pada satuan pendidikan melalui komite sekolah berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah pada pasal 1 ayat 1-2, menjelaskan bahwa penyaluran partisipasi masyarakat memiliki mekanisme dan institusi sendiri, yaitu Dewan Pendidikan untuk di tingkat kabupaten/kota dan Komite Sekolah untuk di tingkat satuan pendidikan (sekolah). Dewan pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di kota atau kabupaten, sedangkan Komite Sekolah merupakan badan sebagai tempat

untuk menyalurkan segala aspirasi dan kontribusi masyarakat di tingkat sekolah untuk mengatur dan merumuskan bersama program kerja yang dilakukan oleh pihak sekolah. Kepala Sekolah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pengelolaan sekolah harus mendengarkan aspirasi yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat baik yang disampaikan secara langsung maupun yang disampaikan melalui Komite Sekolah (Fadjar, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah pada pasal 1 ayat 1-2).

Selanjutnya lebih jelas diatur dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang menyatakan bahwa nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, seperti komite pendidikan, komite sekolah, komite pendidikan luar sekolah, dewan sekolah, majelis madrasah, komite taman kanak-kanak atau nama lain yang di sepakati bersama (Permendikbud No. 75 2016 Tentang Komite Sekolah.pdf, )

Akuntabilitas sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat masih rendah. Terlalu kuatnya dominasi pemerintah pusat dalam manajemen mikro penyelenggaraan pendidikan di sekolah secara sistematis telah memadamkan akuntabilitas sekolah kepada masyarakat sekitarnya. Kedudukan orang tua dan masyarakat sebagai konsumen pendidikan dengan segala kepentingannya telah diabaikan. Kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah selama ini telah dibina oleh pemerintah menjadi birokrat kecil yang lebih takut kehilangan jabatannya daripada kegagalannya dalam mencapai harapan dan memenuhi aspirasi dari masyarakat.

Manajemen partisipasi masyarakat merupakan salah satu bagian dari manajemen substantif sekolah secara keseluruhan. Menurut G.R. Terry Manajemen merupakan suatu proses pengelolaan yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (Aan Hasanah & Amiroh, 2014 : 43).

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan kepada salah satu guru SMP Negeri 2 Bungoro Kabupaten Pangkep menyatakan bahwa sejak tahun 2003 masyarakat sekitar sekolah terkadang melakukan sumbangsi berupa uang secara ikhlas yang diberikan kepada sekolah, masyarakat telah melakukan partisipasi berupa uang, pemberian sumbangan berupa uang itu diberikan setiap ada program yang akan dilakukan oleh sekolah, karena di SMP Negeri 2 Bungoro setiap ada program yang akan mereka lakukan yang menurutnya dibutuhkan partisipasi dari masyarakat mereka melakukan rapat terlebih dahulu mengundang masyarakat seperti hal dalam program pembangunan pagar sekolah pihak sekolah meminta pendapat kepada masyarakat jika ada yang ingin dibangun dan masyarakat dimintai persetujuan akan hal tersebut pemberian sumbangan kepada masyarakat terkadang tidak ditetapkan oleh pihak sekolah semampu masyarakat berikan kepada sekolah. Selain pada partisipasi uang yang diberikan masyarakat juga terlibat dalam program maulid nabi yang di laksanakan disekolah, pihak sekolah tidak bisa melakukan kegiatan apabila tidak ada kesepakatan dari orang tua, pihak sekolah berkegiatan jika ada kesepakatan dari masyarakat namun jika tidak mereka tidak

akan melakukan kegiatan tersebut karena apabila hal itu terjadi pihak sekolah akan disoroti oleh masyarakat sehingga citra sekolah kepada masyarakat buruk. Pada sekolah tersebut sudah terbentuk juga komite sekolah yang mempunyai SK yang dibuat oleh pihak sekolah, mereka di undang dalam setiap kegiatan sekolah serta terkadang mereka yang mengundang pihak sekolah untuk mengikuti rapat.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan informasi yang didapat itu hanya mengenai partisipasi berupa uang dan tidak terlihat ada aspek manajemen partisipasi masyarakat, padahal perlu kita ketahui bahwa pengelolaan dalam suatu Lembaga itu sangat penting karena pengelolaan atau manajemen akan berpengaruh terhadap terlaksananya sebuah program yang baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan, dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan bidang pendidikan, merupakan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan, namun dari wawancara awal yang dilakukan tidak memenuhi aspek itu, ditambah lagi bentuk partisipasi yang diberikan itu masih kurang sehingga untuk melengkapi informasi itu peneliti akan melakukan penelitian mengenai "Manajemen Partisipasi Masyarakat di SMP Negeri 2 Bungoro Kabupaten Pangkep"

## **2. KAJIAN TEORI**

### **2.1. Kajian Teori**

#### **1. Pengertian Manajemen**

Manajemen adalah proses untuk menyelenggarakan dan mengawasi suatu tujuan tertentu, untuk menetapkan kebijakan mengenai apa yang akan dibuat, bagaimana pembiayaannya, memberikan layanan, memilih serta melatih pegawai dan bertanggung jawab dalam membuat susunan organisasi untuk melaksanakan

sebuah kebijakan, berdasarkan pada norma-norma yang telah ditetapkan dan dalam pelaksanaannya memiliki hubungan yang saling berrkaitan dengan lainnya. Hal tersebut dilaksanakan oleh orang atau beberapa orang yang ada dalam organisasi dan diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut (M. Ngalm Purwanto., 2017: 6)

#### **2. Fungsi Manajemen**

Fungsi manajemen merupakan elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut George R. Terry membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Penggerakan) dan *Controlling* (Pengawasan) (Sukarna, 2011: 10).

#### **3. Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Memberdayakan masyarakat sekitar sekolah semakin dirasakan pentingnya pada masyarakat yang telah menyadari dan memahami pentingnya pendidikan, namun tidak berarti pada masyarakat yang masih rendah pemahaman mengenai pendidikan hubungan sekolah dan masyarakat tidak perlu dibina. Adanya hal ini justru menuntut peran lebih aktif dari sekolah untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan sekolah. Melalui pemberdayaan masyarakat dan muncul lingkungan sekitar diharapkan partisipasi masyarakat muncul guna mewujudkan tujuan sekolah dan masyarakat dapat tercapai. Adapun tujuan tersebut adalah meningkatkan kinerja sekolah dan terlaksananya proses pendidikan sekolah secara produktif, efektif dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang produktif dan berkualitas.

Pidarta dalam (Dwinigrum, 2011 : 50) mengemukakan bahwa partisipasi adalah Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta yang mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.

#### **4. Manajemen Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan**

Manajemen partisipatif merupakan pendekatan yang sangat penting dalam reorientasi program sekolah, yakni melakukan pergeseran terhadap penekanan aktifitas menjadi penekanan hasil. Orientasi terhadap aktifitas akan membuat sistem yang dilakukan hanya bersifat semu. Sedangkan orientasi terhadap hasil akan memberikan motivasi untuk beraktifitas mencapai solusi yang sistematis, sehingga akan tercipta kerjasama erat dengan masyarakat dan muncul partisipatif dalam penyelesaian masalah, Korten dalam (Masrurroh, 2015 : 2)

Masrurroh (2015: 4) menyatakan bahwa Manajemen partisipatif merupakan hal yang efektif dalam memperbaiki kinerja, produktifitas, dan kepuasan kerja. Manajemen partisipatif juga merupakan kepentingan etis. Dengan kata lain, merupakan hal yang alami bagi orang untuk ingin berpartisipasi dalam hal yang mempengaruhi mereka dan tidak membiarkan mereka melakukan hal tersebut merupakan hal yang salah secara etika.

Perencanaan partisipatif merupakan salah satu proses pembelajaran yang penting bagi masyarakat. Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan masyarakat, dan dalam prosesnya

melibatkan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Perencanaan partisipatif artinya menekankan partisipasi luas dari semua stakeholders dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pembangunan. (Abady, 2013: 27).

Segi positif dari partisipasi dalam perencanaan adalah program-program sekolah yang telah direncanakan bersama sedangkan segi negatifnya adalah adanya kemungkinan tidak dapat dihindari pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya keputusan bersama. Disini dapat ditambahkan bahwa partisipasi secara langsung dalam perencanaan hanya dapat dilaksanakan dalam masyarakat kecil, sedangkan untuk masyarakat yang besar sukar dilakukan namun dapat dilakukan dengan sistem perwakilan. Masalah yang perlu dikaji adalah apakah yang duduk dalam perwakilan benar-benar mewakili warga masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat yang sangat penting diantaranya: a) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat; b) Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan sekolah apabila mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut. c) Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pendidikan. (Sigalingging dkk., 2014 : 118)

Partisipasi dalam pelaksanaan pendidikan dapat diukur melalui indikator

dari bentuk partisipasi masyarakat. Pada dasarnya penyelenggaraan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah mengupayakan adanya partisipasi aktif dari masyarakat terutama orang tua siswa terhadap berbagai aktivitas sekolah. Partisipasi disini dimaksudkan ikut berperan serta, jadi partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan anggota masyarakat dalam membantu dan bekerja sama dengan sekolah sehingga program sekolah dapat berjalan lancar dan lulusan yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Di dalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan. Ruang lingkup partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: “pertama, menggerakkan sumber daya dan dana. Kedua, kegiatan administrasi dan koordinasi dan ketiga penjabaran program”. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan program merupakan satu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri. (Dwinigrum, 2011: 39)

Partisipasi dalam evaluasi, Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan. Partisipasi evaluasi, keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengendalian dan kontrol terhadap

penyelenggaraan pendidikan, sehingga masyarakat dapat memberikan umpan balik dan penilaian terhadap kinerja lembaga pendidikan. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam penyusunan atau pemberi masukan dalam penyusunan kurikulum bagi sekolah agar kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan siswa.

### **5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat**

Masyarakat pada dasarnya cenderung berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan, tetapi di sisi lain tidak mudah untuk mengajak masyarakat berpartisipasi. Hambatan yang dialami oleh sekolah untuk mengajak partisipasi masyarakat dalam perbaikan mutu pendidikan membuktikan, belum sepenuhnya disadari sebagai tanggung jawab bersama. Realitas tersebut menguatkan asumsi sepenuhnya bahwa partisipasi tidak mudah diwujudkan, karena ada hambatan yang bersumber dari pemerintah dan masyarakat. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program (Normina, 2016: 76-77)

Faktor penghambat partisipasi dalam pendidikan muncul karena beberapa hal, antara lain:

- 1) Budaya paternalism yang dianut oleh masyarakat menyulitkan untuk melakukan diskusi secara terbuka.
- 2) Apatisme karena selama ini masyarakat jarang dilibatkan dalam pembuatan keputusan oleh pemerintah daerah.
- 3) Tidak adanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
- 4) Hambatan kultural, yaitu masih adanya sebagian masyarakat yang menganggap

bahwa pendidikan formal bertentangan dengan adat mereka.

- 5) Hambatan geografis, misalnya jauhnya lokasi sekolah yang diikuti, tidak adanya fasilitas transportasi dan akses jalan yang mendukung untuk mencapai sekolah.
- 6) Mahalnya biaya pendidikan, terutama pada pendidikan tingkat atas dan perguruan tinggi.

Faktor yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pendidikan, antara lain:

- 1) Pola pikir masyarakat yang semakin maju yang menganggap pendidikan sangat penting dan menganggap pendidikan sebagai salah satu jalan untuk memudahkan mereka dalam mencari pekerjaan.
- 2) Adanya stratifikasi sosial yang menempatkan tingkat pendidikan tertentu sebagai sebuah prestise dan salah satu penentu status sosial pada suatu masyarakat.
- 3) Pandangan masyarakat bahwa pendidikan sebagai salah satu cara untuk merubah nasib menjadi lebih baik.
- 4) Fasilitas dan akses menuju sarana pendidikan yang memadai, misalnya saja sudah banyak sekolah yang berada di pelosok desa yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.
- 5) Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan yang terus dilakukan untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat.
- 6) Adanya program wajib belajar 9 tahun dari pemerintah.
- 7) Adanya sekolah kejuruan yang membentuk siswa siap kerja setelah lulus, dan siswa juga bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi yang bertujuan untuk mengetahui data fakta yang ada dilapangan.

#### **3.2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Bungoro Kab. Pangkep Penelitian ini mulai dilaksanakan pada tanggal November 2020 sejak peneliti menyusun proposal penelitian.

#### **3.3. Sumber Data**

Adapun yang menjadi sumber data dan sekaligus sebagai informan dari penelitian ini yaitu guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan tokoh masyarakat.

#### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### **3.5. Teknik Analisis Data**

Data dianalisis dengan menggunakan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan Teknik triangulasi data.

### **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Manajemen Partisipasi Masyarakat**

##### **1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan**

Pada aspek partisipasi masyarakat dalam perencanaan menemukan hasil bahwa penyusunan visi misi sekolah melibatkan masyarakat dan komite sekolah ditandai dengan pihak sekolah bersama

dengan masyarakat merumuskan visi misi dengan salah satu misinya yaitu meningkatkan dan memajukan nilai-nilai budaya daerah dan budaya bangsa, pengaplikasian dari misi ini dengan cara pihak sekolah bermitra dengan masyarakat untuk mendirikan sanggar seni yang disarankan oleh masyarakat, sanggar seni ini berdiri tahun 2012, dan mengembangkan budaya-budaya daerah seperti lagu tradisional daerah dengan cara mengadakan lomba yang selalu mengangkat tema mengenai budaya tradisional, selain itu sanggar seni itu bekerjasama dengan masyarakat untuk memberikan pengetahuan kepada siswa tentang cara menggunakan alat musik tradisional (kecapi), sehingga dapat dikatakan bahwa dalam perumusan visi misi yang dilakukan oleh sekolah dan masyarakat, mereka mengembangkan salah satu misinya dengan berlandaskan pada nilai-nilai budaya tradisional inilah yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya penyusunan program kerja melibatkan komite sekolah ditandai dengan adanya program yang disusun oleh pihak sekolah yang melibatkan masyarakat salah satu program sekolah yang berhubungan dengan masyarakat yaitu perayaan keagamaan dan *English camp*. Mengundang komite sekolah untuk melakukan diskusi mengenai perencanaan program sekolah pada awal tahun pembelajaran atau penyusunan RKAS, Kemudian mengenai perencanaan keuangan sekolah, pihak sekolah selalu melibatkan masyarakat yang diwakili oleh komite sekolah, sehingga kepercayaan mengenai transparansi dana dalam program sekolah semakin tinggi.

Perencanaan yang dimana bertujuan untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam melaksanakan sebuah kegiatan

begitupun dengan pengorganisasian sebagai bentuk untuk pengaplikasian dari sebuah perencanaan biasanya pengorganisasian ini membentuk sebuah kepanitian yang nantinya membuat sebuah kegiatan yang di dasari dari program sekolah. Selain dari itu pengorganisasian sekolah sudah dibuat dibuktikan dengan masyarakat dilibatkan dalam pembagian tugas sekolah kepanitian kegiatan eksternal sekolah, diberikan tanggung jawab untuk ikut serta terlibat langsung dalam kegiatan tersebut, keikutsertaan tersebut diupayakan sebagai bentuk kepedulian terhadap program yang akan dilaksanakan sekolah, dalam pembagian tugas kepanitiaanya diserahkan kepada komite sekolah maupun tokoh masyarakat, selain dari itu dalam struktur organisasi, komite sekolah dilibatkan dalam bagian struktur sekolah dan dibatasi sebagai garis koordinasi yang artinya pihak sekolah dan masyarakat berkoordinasi dalam menjalin hubungan yang baik serta bekerjasama untuk mengembangkan sekolah dengan baik. Adapun bentuk pelibatan masyarakat dalam perencanaan berupa pemberian saran atau pendapat dan pengambilan keputusan mengenai penyusunan visi misi, program kerja, keuangan, struktur organisasi dan pembagian tugas kerja.

## **2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program**

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program sekolah menemukan hasil bahwa pihak sekolah telah melibatkan masyarakat pada aspek pelaksanaan program sekolah, dimana dalam program sekolah salah satunya membahas mengenai keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan program sekolah hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan kegiatan sekolah, seperti perayaan keagamaan pihak sekolah selalu mengundang masyarakat



untuk terlibat dalam kegiatan tersebut, selain daripada itu masyarakat juga di undang dalam rapat untuk menentukan pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun dalam pelaksanaan pembangunan sekolah, masyarakat menjadi bagian dari pembangunan tersebut, keterlibatan yang dilakukan murni sukarela dari masyarakat untuk sekolah.

Sebagaimana diketahui partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat terwujud dalam berbagai pendekatan dan bentuk, sesuai dengan kondisi sosio kultural masyarakat itu sendiri. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa pemberian sumbangan/ bantuan material, sumbangan tenaga, maupun sumbangan pemikiran atau gagasan. Makin maju lingkungan masyarakatnya maka bentuk partisipasinya cenderung pada sumbangan nonfisik, berupa sumbangan pemikiran /gagasan selain materi dan tenaga. Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam pendidikan di SMP Negeri 2 Bungoro Kabupaten Pangkep berupa partisipasi finansial yang diberikan masyarakat untuk sekolah dalam memperlancar terlaksananya kegiatan berupa pemberian sumbangan uang untuk kegiatan yang akan dilakukan sekolah sesuai dengan kesepakatan bersama, dan jumlah sumbangan uang yang diberikan tidak dibatasi disesuaikan kesanggupan masyarakat itu sendiri, salah satunya kegiatan yang membutuhkan sumbangan masyarakat yaitu pada kegiatan maulid nabi SAW, *english camp* dan pelaksanaan UTBK.

SMP Negeri 2 Bungoro mempunyai ikatan yang erat dengan perusahaan PT. Semen Tonasa karena perusahaan ini berada di Kecamatan Bungoro yang tidak jauh dari wilayah SMP Negeri 2 Bungoro

secara langsung pihak perusahaan merasa punya beban moral untuk membantu sekolah, dengan kata lain pihak sekolah mempunyai peluang untuk bekerjasama dengan perusahaan PT. Semen Tonasa, itulah keunikan dari SMP Negeri 2 Bungoro karena mampu bekerjasama dengan salah satu perusahaan besar yang ada di Sulawesi Selatan, karena seperti kita ketahui bahwa sekolah yang masih jenjang SD dan SMP biasanya masih belum dilirik oleh perusahaan untuk melakukan Kerjasama, terkadang perusahaan lebih melirik sekolah kejuruan karena lulusan dari sekolah tersebut mempunyai peluang untuk direkrut menjadi karyawan diperusahaan tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan sistem manajemen partisipasi masyarakat di SMP Negeri 2 Bungoro baik sehingga mereka ingin bekerja sama dengan sekolah tersebut. Selain uang yang diberikan masyarakat juga memberikan bantuan berupa tenaga dalam pembangunan sekolah, serta peralatan masak untuk kegiatan *English camp* dan perayaan lainnya. Bentuk partisipasi masyarakat dalam hal pengambilan keputusan berupa pembentukan kepanitiaan dan pemilihan ketua komite sekolah dari keputusan itu memberikan manfaat yang baik untuk sekolah sehingga masyarakat dan pihak sekolah dapat bekerja sama dengan baik. Masyarakat diundang dalam rapat untuk memberikan keputusan mengenai program yang ingin dilaksanakan dan keputusan mengenai berapa jumlah sumbangan uang yang akan diberikan pada setiap program, keputusan ini bersifat musyawarah sehingga manfaat dari keputusan yang mereka ambil sangat berpengaruh bagi keberlangsungan program maupun perkembangan sekolah. Selain dari itu mengundang masyarakat untuk memberikan pendapat, ide, dan pengetahuan. Pengetahuan yang berikan

masyarakat kepada sekolah berupa mengajarkan kepada siswa cara memainkan alat musik tradisional (kecapi).

Dari gambaran diatas terkait dengan pendapat (Dadang Juliantara, 2004 : 84) yang mengemukakan bahwa: Keterlibatan setiap warga negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan dan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif.

Pendapat diatas mengenai partisipasi masyarakat terkait dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa masyarakat ikut terlibat dalam memberikan serta membuat keputusan pada penyelenggaraan program pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. bentuk keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program berupa pemberian sumbangan uang, untuk memperlancar terlaksananya kegiatan selain dari itu perusahaan PT. Semen Tonasa juga memberikan sumbangan semen untuk pembangunan. Pemberian bantuan berupa tenaga pun diberikan dalam rangka proses pembangunan gedung sekolah.

### **3. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi**

Evaluasi merupakan point terakhir yang dimana sebuah manajemen pasti perlu evaluasi dalam setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Evaluasi disini mempunyai cara membandingkan program yang telah ditetapkan dan dilaksanakan apabila terjadi sebuah penyimpangan maka kepala sekolah sebagai penanggung jawab akan memberikan koreksi kepada masyarakat,

guru-guru dan panitia pelaksana terkait kegiatan yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan program pendidikan, masyarakat juga berperan sebagai pengontrol, melalui laporan masyarakat kepada komite sekolah, sekolah mengetahui kekurangan dan penyimpangan yang dilakukannya dalam pelaksanaan sebuah program. Jika laporan masyarakat tentang penyelenggaraan program pendidikan tersebut dianggap berat, komite sekolah melakukan rapat, komite sekolah melakukan rapat internal untuk menentukan langkah yang akan diambil dalam menyikapi laporan tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi menemukan bahwa di SMP Negeri 2 Bungoro Kabupaten Pangkep telah melibatkan masyarakat pada aspek pengawasan dalam partisipasi masyarakat dibuktikan dengan pihak sekolah selalu mengundang masyarakat untuk terlibat dalam evaluasi kegiatan sekolah guna melihat kesuksesan setiap program yang dilakukan, kegiatan evaluasi ini dilakukan untuk meminta saran kepada masyarakat dan komite sekolah mengenai program yang telah dilaksanakan yang perlu diperbaiki untuk program selanjutnya, pihak sekolah terkadang mengundang orang tua untuk mengevaluasi mengenai perkembangan anaknya, masyarakat juga mengawasi siswa jika ada siswa yang berada diluar sekolah pada saat jam pelajaran, selain itu masyarakat menjaga keamanan lingkungan sekolah, masyarakat merasa keamanan sekolah merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya tanggung jawab guru.

Berdasarkan hasil temuan diatas sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan Keputusan Menteri Pendidikan

Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah pada pasal 1 ayat 1-2. menjelaskan bahwa Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Adapun kewajibannya adalah memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Lebih lanjut partisipasi masyarakat dalam pendidikan bisa meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pendapat diatas mengenai manajemen partisipasi masyarakat terkait dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berperan serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Partisipasi masyarakat sangat penting, sebagai salah satu elemen pendukung terwujudnya pendidikan yang berbasis masyarakat, sehingga manfaat kehadiran pendidikan benar-benar berada di masyarakat, mereka berperan sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Oleh karena itu, masyarakat berhak melaksanakan pendidikan dengan mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar pendidikan nasional. Adapun pendidikan yang berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sumber lainnya. Demikian juga lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan

merata dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

#### **4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat di SMP Negeri 2 Bungoro Kabupaten Pangkep.**

Pelibatan masyarakat dalam program pendidikan menjadi isu penting dalam Undang-undang sistem pendidikan nasional partisipasi itu menjadi bagian terpenting yang ikut menunjang keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, dengan manajemen sekolah yang baik partisipasi itu harus terus digalang dan dikembangkan. Dalam perjalanan pengembangan partisipasi tentu sekolah akan menemukan beberapa kendala dalam hal ini faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat diantaranya:

##### **1. Faktor pendukung partisipasi masyarakat**

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama melakukan penelitian ini faktor yang ikut mempengaruhi motivasi berpartisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, yakni ada faktor pendukung diantaranya:

##### **1) Akutanbilitas dan Transparansi**

Peningkatan partisipasi masyarakat disini dilakukan dengan cara menjalin hubungan yang harmonis terhadap masyarakat dan pihak sekolah. Diperlukan memiliki sikap terbuka terhadap masyarakat, agar sekolah tahu apa yang diinginkan masyarakat tersebut. Bentuk transparansi sekolah terhadap masyarakat adalah laporan berkala yang diberikan sekolah kepada komite sekolah dan orangtua siswa mengenai program-program kegiatan sekolah dan perkembangan perilaku dan kemampuan

siswa. Selain itu, Transparansi diwujudkan melalui pengelolaan sekolah yang terbuka, semua pihak harus dapat menumbuh kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif. Sedangkan untuk menjamin akuntabilitas sekolah terhadap masyarakat, SMP Negeri 2 Bungoro membuka diri untuk menerima saran, kritik, maupun ide-ide. Bentuk akuntabilitas sekolah terhadap masyarakat adalah kesediaan sekolah untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam bidang pendidikan dengan program pendidikan yang sesuai.

Faktor yang mendukung masyarakat terlibat aktif dalam kegiatan sekolah yaitu, akuntabilitas serta transparansinya pihak sekolah dapat mendorong masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam program sekolah adanya kepercayaan masyarakat kepada pihak sekolah serta begitupun sebaliknya adanya keterbukaan pihak sekolah terdapat program sekolah serta dana dari program sekolah kepada masyarakat. Sedangkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, sekolah senantiasa melakukan pengelolaan yang transparan dan melakukan sosialisasi yang terarah dan terprogram kepada semua stakeholder.

Dari gambaran diatas terkait dengan keputusan menteri pendidikan nasional republik indonesia nomor 044/U/2002 tentang Dewan pendidikan dan komite sekolah dimana didalam salah satu peran komite menyebutkan bahwa komite sekolah berperan sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan disatuan pendidikan, hal ini menjelaskan bahwa pihak komite menjadi pengontrol dalam transparansi dan akuntabilitas

sekolah kepada masyarakat sehingga pendapat ini terkait dengan hasil penelitian diatas mengenai salah satu faktor yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pendidikan yaitu adanya keterbukaan dan kepercayaan masyarakat terhadap SMP Negeri 2 Bungoro Kabupaten Pangkep, sehingga mereka terdorong untuk ikutserta dalam program sekolah.

## **2) Inovasi Program**

Masyarakat maupun guru dan kepala sekolah mengungkapkan antusiasme dan dukungan penuh mengenai apapun program sekolah, apalagi kegiatan keagamaan. Sebagai ummat Islam, bagi mereka mendukung program-program keagamaan adalah sebuah kewajiban. Sehingga inovasi program yang ditawarkan kepada masyarakat membuat mereka jadi bersemangat untuk terlibat dalam kegiatan sekolah.

Gambaran hasil penelitian diatas sesuai dengan hasil penelitian (Yudan Hermawan & Yoyon Suryono (2016: 11) yang mengemukakan bahwa salah satu faktor pendukung dalam partisipasi masyarakat yaitu kebermanfaatn program atau inovasi program, dalam artian bahwa jenis program mempunyai pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh lembaga hal tersebut terbukti bahwa masyarakat akan antusias mengikuti program jika program tersebut dapat menambah ilmu dan ketrampilan guna menunjang usaha yang telah mereka geluti, sehingga akan mampu memberikan dampak positif dalam pengembangan usahanya.

## **2. Faktor penghambat partisipasi masyarakat**

Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat namun pekerjaan juga yang dapat menghambat mereka untuk terlibat aktif dalam program sekolah, sesuai dengan penemuan peneliti menginformasikan bahwa pekerjaan masyarakat yang menghambat mereka berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah dikarenakan keterbatasan ekonomi yang dimiliki mengharuskan mereka bekerja sehingga waktu yang dimiliki untuk berpartisipasi secara aktif disekolah tidak maksimal.

Hal diatas sesuai dengan hasil penelitian (Yudan Hermawan & Yoyon Suryono (2016: 11) mengatakan bahwa salah satu faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat yaitu jenis pekerjaan menjadi kendala apabila program tidak bisa dilaksanakan disaat hari atau jam kerja. Sejalan juga dengan pendapat Slamet (1993: 116) jenis pekerjaan masyarakat akan mempengaruhi dan menentukan tingkat partisipasi karena kaitannya dengan penghasilan dan terlebih pada waktu luang mereka untuk digunakan dalam berpartisipasi.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Manajemen Partisipasi Masyarakat di SMP Negeri 2 Bungoro Kabupaten Pangkep maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Manajemen partisipasi masyarakat diantaranya dalam hal perencanaan bentuk pelibatan masyarakat berupa pemberian

saran atau pendapat dan pengambilan keputusan mengenai penyusunan visi misi, program kerja, keuangan, struktur organisasi dan pembagian tugas kerja, selanjutnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program sekolah dimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program berupa pemberian sumbangan uang, untuk memperlancar terlaksananya kegiatan selain dari itu perusahaan PT. Semen Tonasa juga memberikan sumbangan semen untuk pembangunan. Pemberian bantuan berupa tenaga pun diberikan dalam rangka proses pembangunan gedung sekolah, dan yang terakhir partisipasi dalam evaluasi yang mencakup kegiatan evaluasi yang dilakukan untuk meminta saran atau pendapat kepada masyarakat mengenai program yang telah dilaksanakan yang perlu diperbaiki untuk program selanjutnya. Dari ketiga fungsi manajemen tersebut dalam konsep partisipasi masyarakat, pihak sekolah telah melibatkan masyarakat secara aktif, partisipatif, dan komprehensif. 2) Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat ada dua, faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung terdiri dari akuntabilitas dan transparansi dari pihak sekolah, dan inovasi program. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu keterbatasan waktu yang dimiliki masyarakat menghambat mereka untuk berpartisipasi secara maksimal karena mereka memiliki kesibukan lain diluar dari kegiatan di Sekolah seperti pekerjaan dari masyarakat.

### **5.2. Saran**

Sehubungan dengan hasil peneliti yang telah dikemukakan di atas dan berbagai keterbatasan yang dimiliki penulis dalam penelitian ini, serta implikasinya dalam upaya memberikan motivasi, semangat dan

perhatian yang serius terhadap guru-guru, maka saran-saran yang dapat dikemukakan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat/orang tua peserta didik agar mampu meningkatkan partisipasinya agar menjadikan sekolah sebagai sekolah yang patut dicontohi, terutama dalam hal pemanfaatan jasa layanan pendidikan oleh masyarakat melalui komunikasi yang lebih intensif kepada unsur masyarakat yang lebih luas tentang program pendidikan yang disediakan sekolah.
2. Kepada kepala sekolah, para guru dan pihak-pihak sekolah agar meningkatkan kinerjanya dan bersemangat lagi dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, dan mengajarkan peserta didik agar menjadi manusia yang dapat berguna bagi bangsa dan negara. Kerjasama antara sekolah dengan masyarakat yang telah terjalin selama ini, hendaknya senantiasa ditingkatkan kerjasama dan kepercayaannya, sehingga eksistensi dan perkembangan SMP Negeri 2 Bungoro Kabupaten Pangkep semakin meningkat di masa mendatang;
3. Kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep untuk dapat memperhatikan segala permasalahan yang dihadapi pengelola dan guru dalam peningkatan partisipasi masyarakat di SMP Negeri 2 Bungoro Kabupaten Pangkep.
4. Kepada peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan untuk melanjutkan penelitian yang serupa dengan melihat apa-apa yang perlu diperhatikan dan diperbaiki dalam meningkatkan partisipasi masyarakat demi peningkatan mutu pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aan Hasanah & Amiroh. (2014). *Inovasi Pengelolaan Pendidikan* (Cetakan 1). Stit Pematang Press.
- Abady, A. P. (2013). *Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Daerah*. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(1). <https://doi.org/10.26618/Ojip.V3i1.55>
- Dwinigrum, S. I. A. (2011). *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- I Nyoman Sumaryadi. (2010). Sumaryadi, I. Nyoman., 2010, *Sosiologi Pemerintahan*. Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor. Ghalia Indonesia.
- M. Ngali Purwanto. (2017). *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan* (Cet 24). Rosdakarya.
- Masurroh, M. L. (2015, Jumat, Mei). Bidan Cantik: *Manajemen Partisipatif Pengertian, Tujuan Dan Kaitan Manajemen Partisipatif Dengan Kebidanan*. Bidan Cantik. <https://mayalatifatulmasurroh.blogspot.com/2015/05/Manajemen-Partisipatif-Pengertian.html>
- Normina, N. (2016). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Ittihad, 14(26). <https://doi.org/10.18592/ittihad.v14i26.874>
- Yudan Hermawan & Yoyon Suryono. (2016). *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Program Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ngudi Kapinteran*. Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat, Volume 3 – Nomor 1, Maret 2016, (97-108), 1–12.